

**ANALISA PERSEPSI DAN PREFERENSI MASYARAKAT
KOTA BANDAR LAMPUNG MENUJU KOTA LAYAK HUNI
DITINJAU DARI ASPEK EKONOMI DAN ASPEK FISIK
KOTA**

JURNAL TUGAS AKHIR

**ANNISA AULA AUDIA
11319027**



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK DAN DESAIN
INSTITUT TEKNOLOGI SAINS BANDUNG
KABUPATEN BEKASI
2024**

**ANALISA PERSEPSI DAN PREFERENSI MASYARAKAT
KOTA BANDAR LAMPUNG MENUJU KOTA LAYAK HUNI
DITINJAU DARI ASPEK EKONOMI DAN ASPEK FISIK
KOTA**

JURNAL TUGAS AKHIR

**ANNISA AULA AUDIA
11319027**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Perencanaan Wilayah dan Kota Pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan
Kota



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK DAN DESAIN
INSTITUT TEKNOLOGI SAINS BANDUNG
KABUPATEN BEKASI
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISA PERSEPSI DAN PREFERENSI MASYARAKAT
KOTA BANDAR LAMPUNG MENUJU KOTA LAYAK HUNI
DITINJAU DARI ASPEK EKONOMI DAN ASPEK FISIK
KOTA**

JURNAL TUGAS AKHIR

**ANNISA AULA AUDIA
11319027**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Perencanaan Wilayah dan Kota
Pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyetujui,
Bekasi, 19 Juli 2024
Pembimbing



Syahyudesrina, ST., MT.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota



Desiree Marlyn Kipuw, ST., MT.

ANALISA PERSEPSI DAN PREFERENSI MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG MENUJU KOTA LAYAK HUNI DITINJAU DARI ASPEK EKONOMI DAN ASPEK FISIK KOTA

Annisa Aula Audia ⁽¹⁾, Syahyudesrina ⁽²⁾

⁽¹⁾ Annisa Aula Audia, Mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS B

⁽²⁾ Syahyudesrina, ST., MT., Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS B

Abstrak

Kota Bandar Lampung merupakan ibukota Provinsi Lampung merupakan pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung yang memiliki letak geografis yang sangat strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat mempengaruhi perkotaan di sekitarnya dan menjadi orientasi pemerintah pusat dalam pengembangan antar daerah di Indonesia. Berdasarkan hasil survei *Most Livable City Index* (MLCI) pada tahun 2017 dan tahun 2022, Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan *index livability*, akan tetapi masih terdapat aspek dengan indeks terendah yaitu aspek ekonomi dan aspek fisik kota yang artinya pada aspek tersebut perlu lebih diperhatikan lagi mengapa sampai tahun 2022 dengan jangka waktu 5 tahun, kedua aspek tersebut masih mendapatkan indeks yang rendah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi penilaian kota layak huni di Kota Bandar Lampung ditinjau dari aspek ekonomi dan aspek fisik kota, mengidentifikasi gap atau kesenjangan terkait variabel dari aspek ekonomi dan aspek fisik kota berdasarkan persepsi dan preferensi masyarakat, dan mengidentifikasi variabel yang perlu ditangani secara prioritas ditinjau dari aspek ekonomi dan aspek fisik kota berdasarkan persepsi dan preferensi masyarakat. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis campuran antara analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada tahun 2024, dapat dilihat bahwa Kota Bandar Lampung terjadi peningkatan indeks kota layak huni pada aspek ekonomi dan fisik kota sebesar 2,4% pada tahun 2024. Kemudian seluruh indikator secara keseluruhan memiliki nilai gap negatif dan tidak ada yang bernilai positif satupun, artinya dari 44 indikator aspek ekonomi dan aspek fisik kota pada saat ini kinerjanya tidak ada atau belum memenuhi harapan warga Kota Bandar Lampung. Lalu setelah dilakukan analisis variabel prioritas hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 22 indikator (aspek ekonomi dan fisik kota) yang perlu ditingkatkan saat ini, yaitu indikator yang berada pada kuadran I.

Kata Kunci : *Layak Huni, Aspek Ekonomi, Aspek Fisik kota*

Pendahuluan

Kota atau *city* adalah tempat dengan konsentrasi penduduk lebih padat dari wilayah sekitarnya karena terjadi pemusatan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas penduduknya (Pontoh dan Kustiawan, 2009). Seperti yang kita ketahui, bahwa pada umumnya kota juga merupakan suatu wilayah yang terstruktur dengan berbagai aktivitas di dalamnya seperti aktivitas ekonomi, sosial, budaya dan politik di dalam suatu area geografis yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dan menjadi salah satu motivasi seseorang untuk berpindah dari desa ke kota atau biasa disebut dengan urbanisasi (Adisasmita, 2014). Peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali karena ketidakmampuan suatu kota dalam menghadapi urbanisasi, dapat menjadi masalah dalam pembangunan kota-kota di Indonesia. Menurut (Nugroho, 2022), permasalahan yang timbul akibat adanya urbanisasi adalah kepadatan penduduk, terhambatnya pembangunan infrastruktur, ketersediaan lahan menjadi berkurang sehingga kota tersebut terlihat padat dan kumuh. Dengan adanya berbagai macam permasalahan tersebut mengakibatkan ketidaknyamanan masyarakat dalam beraktivitas di dalamnya.

Ketidaknyamanan masyarakat akan permasalahan-permasalahan yang timbul di perkotaan perlu diatasi agar masyarakat dapat melakukan aktivitas dengan nyaman. Sebuah kota dapat dikatakan sebagai kota yang layak huni apabila kota tersebut menggambarkan keadaan atau suasana yang nyaman sebagai tempat tinggal dan tempat beraktivitas dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Konsep kota yang nyaman untuk dijadikan

tempat tinggal disebut dengan *Livable City*, di mana dalam mewujudkan kota layak huni harus melihat indikator-indikator yang berada di dalamnya baik aspek fisik (sarana, prasarana, dan transportasi) bahkan aspek non fisik (sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan) (IAP, 2009). Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) merupakan organisasi profesi perencanaan wilayah dan kota yang sering melakukan survei atau penelitian, salah satunya adalah *Most Livable City Index* (MLCI), survei tersebut dilakukan setiap tiga sampai lima tahun sekali dengan harapan dapat menjadi tolok ukur penilaian kelayakhunian kota-kota di Indonesia, yang bertujuan untuk mengukur kualitas kehidupan warga kota berdasarkan persepsi warga kota itu sendiri terhadap pelayanan kota dan kehidupan kota yang di tempatinya, sehingga output yang dihasilkan atau penilaiannya belum sepenuhnya menggambarkan kondisi faktual karena hanya berdasarkan persepsi warga kota yang bersifat dinamis, namun aspek, variabel, dan indikator pada konsep *livability* yang digunakan, dapat memberikan gambaran kebutuhan warga terhadap kotanya, karena masyarakat sebagai individu yang berkaitan langsung dengan lingkungan sekitar.

Pada tahun 2022, Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia kembali meluncurkan indeks kota layak huni di Indonesia melalui survei bertajuk *Most Livable City Index* (MLCI) dengan 28 kriteria di 52 Kota dari 32 Provinsi di Indonesia salah satunya adalah Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung merupakan ibukota Provinsi Lampung, serta sebagai pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan. Kota Bandar Lampung juga merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Hasil survei *Most Livable City Index* (MLCI) oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) pada tahun 2017 dan tahun 2022,

menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan *index livability*. Pada tahun 2017 Kota Bandar Lampung mendapat predikat sebagai kota tidak layak huni (*bottom tier city*) peringkat ke-24 dari 26 Kota yang di survei oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia dengan nilai *index livability* di bawah rata-rata yaitu sebesar 56,4. Sedangkan, menurut hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) pada tahun 2022, Kota Bandar Lampung mendapat predikat sebagai (*average tier city*) yaitu kota dengan nilai *index livability* rata-rata kota sebesar 69, dan dapat disimpulkan bahwa Kota Bandar Lampung memiliki indeks yang meningkat secara signifikan. Pada tahun 2022 Kota Bandar Lampung mendapat peringkat ke-8 dari 52 Kota di Indonesia dan untuk membuat Kota Bandar Lampung menjadi kota yang layak huni atau top tier city harus mencapai nilai *Index Livability* sebesar 70-77 (Hasil Survei *Most Livable City Index* (MLCI) tahun 2017 dan tahun 2022).

Berdasarkan nilai *index livability* pada tahun 2022, diketahui masih terdapat aspek dengan indeks terendah berdasarkan aspek *Most Livable City Index* (MLCI) yang dikeluarkan oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) pada tahun 2017 dan tahun 2022 yaitu aspek ekonomi dan aspek fisik kota, yang artinya masih terdapat beberapa aspek yang belum layak dan aspek tersebut perlu lebih diperhatikan lagi mengapa sampai tahun 2022 dengan jangka waktu 5 tahun, kedua aspek tersebut masih mendapatkan indeks yang rendah sehingga dibutuhkan arahan alternatif peningkatan ketercapaian kota layak huni pada variabel prioritas berdasarkan persepsi dan preferensi masyarakat.

Menurut arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani skala provinsi, akan tetapi Kota Bandar Lampung masih memiliki *index livability* yang rendah dan belum termasuk ke dalam *top tier city*. Untuk mendukung Kota Bandar Lampung yang ditetapkan sebagai kawasan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan peruntukan pengembangan sistem perkotaan dan juga merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, Kota Bandar Lampung harus dapat melayani kegiatan perkotaan dengan standar pelayanan maupun kualitas sistem perkotaan yang baik, karena idealnya kota yang menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) harus memiliki infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk menjadi pusat kegiatan yang melibatkan seluruh kegiatan nasional. Hal ini dapat meliputi pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat pendidikan, pusat budaya, dan pusat pendukung jasa pariwisata.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, diperlukan kajian tentang kota layak huni dengan memfokuskan pada dua aspek yaitu aspek ekonomi dan aspek fisik kota di Kota Bandar Lampung, tidak hanya berdasarkan persepsi masyarakat namun juga berdasarkan preferensi masyarakat, sehingga nantinya dapat dilihat dari dua sisi apa yang dirasakan masyarakat dan apa yang diharapkan oleh masyarakat terhadap kota yang ditinggali. Maka dari itu, judul yang diangkat dari penelitian ini adalah "Analisa Persepsi dan Preferensi Masyarakat Kota Bandar Lampung Menuju Kota Layak Huni Ditinjau dari Aspek Ekonomi dan Aspek Fisik Kota". Sehingga dari hasil kajian tersebut dapat menjadikan Kota Bandar Lampung menjadi kota yang layak huni bagi masyarakatnya sesuai dengan standar *index livability* yang ditetapkan oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia.

Tinjauan Literatur

Kota Layak Huni

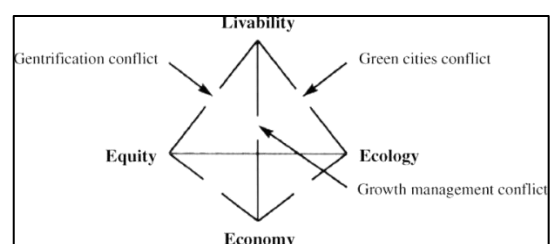
Kota layak huni atau *livable city* dapat diartikan, dimana masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan tenang dalam suatu kota. Menurut (Hahlweg,1997), kota yang layak huni adalah "*The livable city is a city for all people*", atau kota yang dapat menampung seluruh kegiatan masyarakat kota dan aman bagi seluruh masyarakat tanpa berdasarkan status sosial. Kota layak huni erat kaitannya dengan kota yang berkelanjutan, karena kota tersebut mampu untuk memenuhi setiap kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya (Salzano,1997).

Di Indonesia, istilah kota layak huni atau *livable city* menjadi sering digunakan sebagai parameter penting dalam mengukur keberhasilan pemerintah, baik daerah maupun pusat terhadap kotanya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakatnya. Dalam konsep *livable city*, elemen fisik dan sosial ekonomi dalam suatu kota harus berkolaborasi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Konsep Kota Layak Huni

Konsep kota layak huni adalah konsep pembangunan kota yang bertujuan untuk menciptakan kota yang ramah lingkungan, aman, sehat, berkelanjutan serta peningkatan dalam kualitas hidup dimana membutuhkan fisik maupun habitat sosial untuk realisasinya. Konsep tersebut melibatkan beberapa aspek seperti permukiman, transportasi, lingkungan, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Dalam mewujudkan konsep *livable city* harus didukung dengan *sustainable city*, agar perencanaan ruang kota dapat terwujud sesuai dengan rencana. Dengan demikian persepsi warga pada konsep *livability* dapat dijadikan dasar pembangunan kota di masa mendatang secara berkelanjutan.

Terdapat konsep *livable city* yang diadaptasi oleh Goldschalk (2004, sebagaimana dikutip dalam Berke et al, 2006), menyatakan bahwa *livability* merupakan nilai tertinggi dari *new urbanism* dengan fokus manajemen konflik pertumbuhan dengan mengintegrasikan nilai *livability* dan ekonomi melalui desain urban. Berikut merupakan model prisma *livability*:



Gambar 1. Model Prisma *Livability*

Sumber: Saha, 2009

Pada model prisma *livability* diatas, terdapat tiga aspek yang mempengaruhi kehidupan suatu kota yaitu ekonomi, lingkungan, kesetaraan sosial dan puncaknya yang merupakan hasil yaitu kelayakhunian sehingga aspek-aspek tersebut harus seimbang serta memerlukan pengelolaan dan keterpaduan yang komprehensif, baik perencanaan maupun pengembangan. Ketiga aspek tersebut, memiliki dampak yang sangat besar terhadap kelayakhunian suatu kota sehingga tiap aspek memiliki masalahnya masing-masing. Untuk itu, sangat penting memperhatikan ketiga aspek tersebut supaya terwujudnya

kota yang layak huni dan mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin akan timbul kedepannya.

Persepsi dan Preferensi Masyarakat

Pengertian persepsi menurut Robbins (2003) adalah pandangan atau sudut pandang dari individu yang berkaitan dengan lingkungan sekitar, yaitu sebagai proses di mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Sebagai contohnya adalah persepsi individu A dan B mengenai kenyamanan tinggal di kota, maka persepsi masing-masing individu tersebut akan menghasilkan perbedaan cara pandang terhadap faktor kenyamanan tersebut.

Menurut Elizabeth Burton dan Lynne Mitchell, dalam buku yang berjudul *"Sustainable Urban Development Reader"* (2006), menjelaskan bahwa preferensi masyarakat terkait kota layak huni mencakup harapan dan keinginan masyarakat terhadap kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan fisik yang dianggap penting untuk kehidupan perkotaan yang berkualitas dimasa sekarang dan masa yang akan datang.

Persepsi dan preferensi masyarakat saling berkaitan satu sama lain untuk mewujudkan suatu kota menjadi kota yang layak huni. Preferensi masyarakat terhadap tingkat kepentingan variabel kota layak huni berdasarkan aspek ekonomi dan aspek fisik kota digunakan untuk menilai sejauh mana masyarakat menganggap penting dan memprioritaskan variabel-variabel tersebut dengan tujuan untuk menciptakan dan menjaga kualitas kehidupan kota yang layak di Kota Bandar Lampung.

Metodologi

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode campuran antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. *Mixed research* atau pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan bentuk kualitatif dan kuantitatif (Creswell, 2015). Sedangkan menurut (Sugiyono, 2013), metode penelitian kombinasi merupakan pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif yang mencakup landasan filosofis, penggunaan pendekatan, dan mengkombinasikan kedua pendekatan dalam penelitian.

Metode Pengambilan Sampel

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis berdasarkan sumber datanya, yaitu data sekunder dan data primer. Survei data primer dilakukan dengan observasi untuk mengamati langsung keadaan di wilayah penelitian, wawancara, dan penyebaran angket atau kuesioner. Penentuan jumlah responden penelitian ini menggunakan kriteria purposive sampling dengan menggunakan rumus Slovin dengan diperoleh 99 responden, dibulatkan 100 responden yang kemudian dibagi kembali melalui *proportional purposive sampling* per masing-masing wilayah administrasi kecamatan. Kemudian sampel yang digunakan untuk wawancara yaitu stakeholder yang memiliki peran dan keterlibatan secara langsung yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perdagangan, Dinas Ketenagakerjaan dan Badan Perencanaan dan Pembangunan yang di Kota Bandar Lampung. Sedangkan untuk survei sekunder dilakukan dengan peninjauan terhadap buku, penelitian sebelumnya, dokumen peraturan yang berlaku, sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Metode Analisis Data

Adapun metode analisis dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab sasaran penelitian, terdiri dari:

Analisis penilaian kota layak huni berdasarkan aspek ekonomi dan aspek fisik kota

Analisis penilaian menggunakan menggunakan kuesioner dengan skala *likert* untuk melihat persepsi dan preferensi masyarakat terhadap variabel kota layak huni yang ditinjau dari aspek ekonomi dan aspek fisik kota. Berikut penilaian skala *likert*:

Tabel 1. Penilaian Skala *Likert*

Persepsi	Preferensi	Skala
Sangat Setuju	Sangat Penting	5
Setuju	Penting	4
Cukup Setuju	Cukup Penting	3
Tidak Setuju	Tidak Penting	2
Sangat Tidak Setuju	Sangat Tidak Penting	1

Sumber: Hasil Pengolahan, 2024 (diadaptasi dari Sugiyono, 2011)

Kemudian dilakukan penentuan indeks kota layak huni berdasarkan aspek ekonomi dan fisik kota dari kuesioner tersebut dengan persamaan berikut ini:

$$\text{Indeks} = \frac{\text{Total skor riil parameter}}{\text{Skor maksimum parameter}} \times 100$$

Untuk menentukan rentang nilai kelayakan kota tersebut, kemudian dibagi kedalam beberapa kategori persepsi dan preferensi sebagai berikut:

Tabel 2. Nilai Indeks Persepsi dan Preferensi Kota Layak Huni

Nilai Indeks	Kategori Persepsi	Kategori Preferensi
81-100	Sangat Layak Huni	Sangat Penting
61-80	Layak Huni	Penting
41-60	Cukup Layak Huni	Cukup Penting
21-40	Kurang Layak Huni	Kurang Penting
0-20	Tidak Layak Huni	Sangat Tidak Penting

Sumber: Sintesis Peneliti, 2024

Analisis gap kota layak huni berdasarkan persepsi dan preferensi masyarakat terhadap aspek ekonomi dan aspek fisik kota

Analisis gap menghitung antara nilai persepsi dan preferensi masyarakat. Untuk melakukan analisis kesenjangan (*gap analysis*) antara persepsi dan harapan atau preferensi menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$Q = P (\text{perception}) - E (\text{expectation})$$

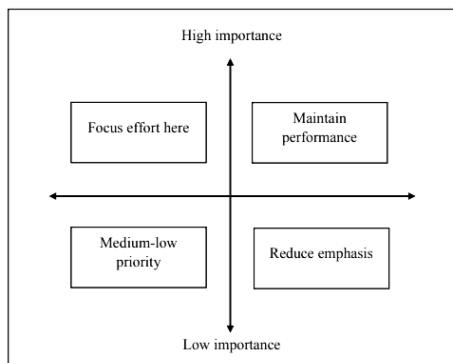
Keterangan :

- Jika gap positif (persepsi > harapan), maka dapat dikatakan memuaskan
- Jika gap nol (persepsi = harapan), maka dapat dikatakan berkualitas dan memuaskan
- Jika gap negatif (persepsi < harapan), maka dapat dikatakan tidak berkualitas dan tidak memuaskan

Dalam menentukan kelayakan sebuah kota, biasanya tingkat pelayanan yang baik memiliki nilai GAP yang semakin rendah (Irawan, 2002).

Analisis variabel yang perlu ditangani secara prioritas ditinjau dari aspek ekonomi dan aspek fisik kota

Analisis ini menggunakan *Important Performance Analysis* (IPA). Menurut Kotler (2000), *Important Performance Analysis* (IPA) merupakan teknik analisis deskriptif yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor ataupun variabel dalam memenuhi kepuasan masyarakat terhadap kota layak huni. Hasil analisis ini kemudian akan dibagi menjadi 4 kuadran dalam *Importance Performance Analysis* (IPA) dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2. Kuadran Kartesius Analisis IPA
Sumber: Kotler, 2000

Tahap analisis selanjutnya untuk merumuskan variabel prioritas yang mempengaruhi peningkatan ketercapaian kota layak huni, dilakukan melalui data primer dan sekunder yang telah diperoleh serta hasil dan proses *Importance Performance Analysis* (IPA) berdasarkan tingkat persepsi dan tingkat preferensi masyarakat. Proses penyusunan perumusan dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif yang disajikan secara tertulis dengan menggunakan metode triangulasi. Metode ini merupakan pendekatan yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data untuk memeriksa dan menetapkan validitas yang didasarkan dari berbagai perspektif. Norman K. Denkin dikutip oleh Mudjia Rahardjo (2012) mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda serta dengan berbagai cara dan waktu.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan pada wilayah studi yaitu Kota Bandar Lampung, yang terletak di sebelah barat daya Pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung yang berperan sebagai pusat perekonomian, diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak pemerintah kota terkait kelayakhunian Kota Bandar Lampung yang ditinjau dari aspek ekonomi dan fisik kota sehingga perencanaan dan pengembangan kota akan lebih tepat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

1. Analisis Penilaian Kota Layak Huni di Kota Bandar Lampung Ditinjau dari Aspek Ekonomi dan Aspek Fisik Kota

Analisis Tingkat Kelayakhunian Kota Bandar Lampung

Berdasarkan analisis dapat diketahui bahwa terdapat tiga hal yang akan terjadi dalam tingkat kelayakan yaitu apabila nilai persepsi berada di bawah preferensi maka responden merasa kecewa dan tidak puas dengan indikator tersebut dan sebaliknya apabila persepsi sesuai dengan preferensi maka responden merasa puas, sedangkan jika persepsi memiliki nilai melebihi preferensi,

maka responden merasa sangat puas dengan indikator tersebut. Adapun nilai kelayakhunian Kota Bandar Lampung pada aspek ekonomi dan aspek fisik kota disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Tingkat Kelayakhunian Aspek Ekonomi dan Aspek Fisik Kota

Aspek	Rata-Rata Tingkat Kelayakhunian
Ekonomi	74.026%
Fisik Kota	71.118%

Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan perhitungan tingkat kelayakan antara tingkat persepsi dan tingkat preferensi masyarakat diperoleh hasil bahwa nilai rata-rata kelayakan pada aspek ekonomi dan fisik kota secara keseluruhan menurut penilaian masyarakat cukup layak huni atau cukup baik yang disesuaikan dengan tabel kategori persentase tingkat kelayakan. Untuk aspek ekonomi memiliki nilai rata-rata kelayakan sebesar 74.026% dan nilai rata-rata kelayakan aspek fisik kota sebesar 71.118%. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa kedua aspek memiliki tingkat kelayakan yaitu cukup layak huni atau cukup baik. Namun, jika dilihat secara rinci dari seluruh 44 indikator, ada beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian lebih, karena masih memiliki nilai dengan tingkat kelayakan yaitu kurang layak huni atau kurang baik. Jika nilai dari tingkat kelayakan mendekati 100 maka dapat dikatakan tingkat kelayakan suatu kota sangat layak huni atau sangat baik dan dari seluruh 44 indikator yang diteliti tidak ada indikator yang memiliki nilai tingkat kelayakan 100%, artinya menurut penilaian masyarakat berdasarkan kedua aspek yang diteliti, Kota Bandar Lampung belum termasuk kedalam kategori kota sangat layak huni atau sangat baik sehingga perlu adanya perbaikan.

Analisis Tingkat Persepsi dan Preferensi Masyarakat Kota Bandar Lampung

Untuk dapat melihat posisi setiap indikator secara lebih terperinci didalam diagram kartesius, maka langkah selanjutnya perlu dilakukan perhitungan terlebih dahulu untuk setiap butir pertanyaan atau indikator dengan tujuan mendapatkan nilai *mean* (rata-rata) tingkat persepsi dan preferensi dari setiap indikator baik aspek ekonomi maupun aspek fisik kota, dengan cara dilakukannya penjumlahan dari nilai total jawaban setiap indikator lalu dibagi dengan jumlah responden sebanyak 100 responden, sehingga menghasilkan nilai rata-rata persepsi dan preferensi setiap indikator. Kedua nilai tersebut selanjutnya akan digunakan untuk batas obyektif dalam pemetaan dari tiap-tiap item dalam diagram kartesius, karena diagram kartesius tersebut akan dibagi menjadi empat kuadran (I,II,III, dan IV) yang akan dibatasi oleh dua buah garis berpotongan horizontal dan vertikal. Skor rata-rata tingkat persepsi, selanjutnya digunakan untuk menjadi sumbu mendatar (x), sedangkan skor rata-rata tingkat kepentingan atau preferensi menjadi sumbu vertikal (y). Hasil perhitungan nilai *mean* (rata-rata) tingkat persepsi dan preferensi masyarakat dari aspek ekonomi dan aspek fisik kota disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Nilai *Mean* (Rata-Rata) Persepsi dan Preferensi Masyarakat Kota Bandar Lampung Aspek Ekonomi dan Aspek Fisik Kota

Aspek	Persepsi	Preferensi
Ekonomi	2,99	4,05
Fisik Kota	2,87	4,00

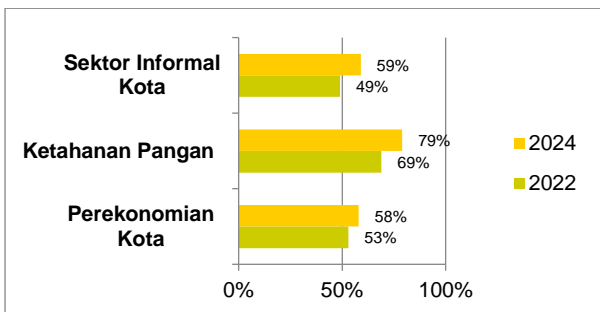
Sumber: Hasil Analisis

Dari hasil analisis tersebut didapatkan bahwa untuk aspek ekonomi kota, nilai rata-rata pada jumlah nilai masing-masing variabel dari tingkat persepsi masyarakat yaitu 2,99 (untuk sumbu x pada diagram kartesius) dan rata-rata dari tingkat ekspektasi masyarakat yaitu 4,05 (untuk sumbu y pada diagram kartesius). Sedangkan untuk aspek fisik kota nilai rata-rata pada jumlah nilai masing-masing variabel dari tingkat persepsi masyarakat yaitu 2,87 (untuk sumbu x pada diagram kartesius) dan rata-rata dari tingkat preferensi masyarakat yaitu 4,00 (untuk sumbu x pada diagram kartesius).

Maka dari rata-rata tersebut didapatkan indikator yang dianggap responden dengan tingkat kinerja paling rendah dan tingkat kepentingan tertinggi yaitu yang memiliki skor di atas rata-rata secara keseluruhan.

Perbandingan Hasil Kota Layak Huni Tahun 2022 dan Tahun 2024

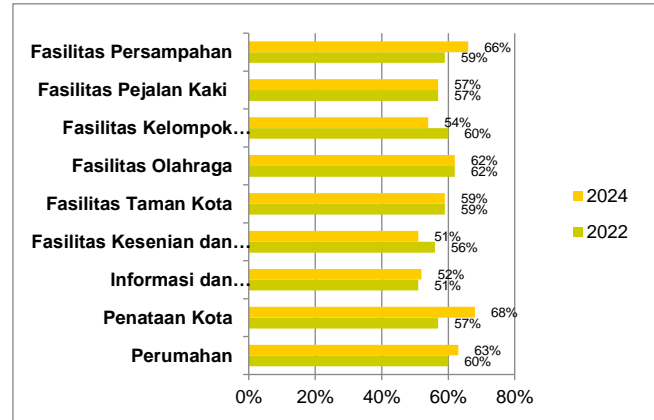
Dikarenakan belum adanya survei terbaru pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), maka dari itu peneliti melakukan survei kembali untuk melihat apakah ada peningkatan dari hasil survei sebelumnya terkait dua aspek yang menjadi fokus dari penelitian ini. Hasil dari survei yang telah dilakukan pada tahun 2024, Kota Bandar Lampung mendapatkan persentase nilai indeks sebesar 60%, sedangkan hasil survei yang dilakukan oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) pada tahun 2022 memiliki nilai indeks sebesar 57,60%. Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 Kota Bandar Lampung terjadi peningkatan nilai indeks sebesar 2,4% dari hasil survei atau penilaian pada tahun 2022. Berikut ini adalah perbedaan indeks kota layak huni pada tahun 2022 dan tahun 2024 pada aspek ekonomi dan aspek fisik kota, yang dapat dilihat pada gambar diagram di bawah ini:



Gambar 3. Perbandingan Hasil Survei IAP Tahun 2022 dan Tahun 2024 Aspek Ekonomi
Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan diagram bar tersebut, dapat diketahui bahwa semua variabel pada aspek ekonomi mengalami peningkatan indeks secara signifikan baik untuk variabel perekonomian kota, ketahanan pangan dan sektor informal kota. Variabel sektor informal kota dan ketahanan pangan meningkat sebesar 10%. Hal tersebut terjadi karena sektor informal kota menjadi salah satu sektor yang turut menopang perekonomian di Kota Bandar Lampung salah satunya adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pertumbuhan sektor informal, terutama dalam hal usaha mikro dan kecil di sektor pangan, dapat membantu dalam meningkatkan akses dan ketersediaan pangan lokal bagi masyarakat serta membantu dalam mempertahankan keberlanjutan sektor pertanian lokal dan memperkuat ketahanan pangan di Kota Bandar Lampung. Sangat penting untuk memperhatikan ketahanan pangan di Kota Bandar Lampung, karena kota tersebut memiliki keanekaragaman kondisi ketahanan pangan yang berbeda-beda setiap

kecamatan sehingga menjadi strategi dan arah kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah.



Gambar 4. Perbandingan Hasil Survei IAP Tahun 2022 dan Tahun 2024 Aspek Fisik Kota
Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan diagram bar tersebut, dapat diketahui bahwa semua variabel pada aspek fisik kota ada yang mengalami peningkatan indeks secara signifikan yaitu variabel perumahan, penataan kota, dan fasilitas persampahan. Kemudian terdapat variabel yang memiliki indeks yang sama pada tahun 2022 dan tahun 2024 yaitu variabel fasilitas taman kota, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki dan terdapat beberapa variabel yang justru mengalami penurunan indeks seperti fasilitas kesenian dan budaya serta fasilitas kelompok rentan yang artinya pada variabel tersebut belum ada peningkatan dari tahun sebelumnya sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik kedepannya untuk masyarakat Kota Bandar Lampung.

2. Analisis Gap atau Kesenjangan Terkait Variabel Kota Layak Huni Berdasarkan Persepsi dan Preferensi Masyarakat

Dapat dilihat dari hasil perhitungan diatas, bahwa seluruh indikator secara keseluruhan memiliki nilai gap negatif dan tidak ada yang bernilai positif satupun, artinya dari 44 indikator aspek ekonomi dan aspek fisik kota pada saat ini kinerjanya tidak ada atau belum memenuhi harapan masyarakat. Walaupun pada kenyataannya terdapat peningkatan variabel pada aspek ekonomi dan aspek fisik kota dari hasil perbandingan survei IAP tahun 2022. Untuk aspek ekonomi memiliki nilai rata-rata gap sebesar -1,05, jika dilakukan perbandingan dapat disimpulkan bahwa variabel yang memiliki nilai gap paling tinggi yaitu sektor informal kota dan perekonomian kota. Sedangkan untuk aspek fisik kota memiliki nilai rata-rata gap sebesar -1,13, dimana variabel yang memiliki nilai gap paling tinggi yaitu ada pada variabel perumahan.

Dengan melihat nilai gap sebelum melakukan Analisis *Important Performance Analysis* (IPA) dapat membantu untuk mengidentifikasi kelemahan, menentukan prioritas utama dalam upaya pembangunan Kota Bandar Lampung menuju kota layak huni serta mengukur kemajuan setiap indikator dalam upaya menuju standar kota layak huni di Kota Bandar Lampung bagi masyarakatnya.

Tabel 5. Perhitungan Rata-Rata Gap Aspek Ekonomi dan Aspek Fisik Kota

Aspek	Nilai Gap
Ekonomi	1,06
Fisik Kota	1,13

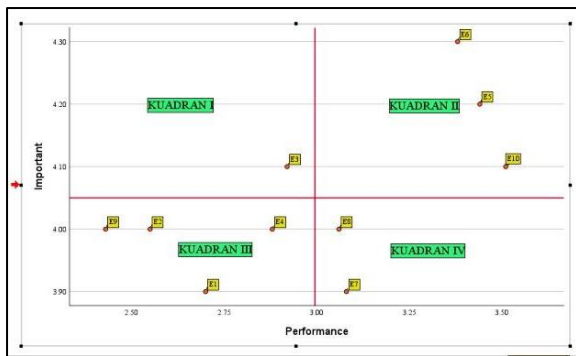
Sumber: Hasil Analisis

3. Analisis Variabel yang perlu ditangani Secara Prioritas Ditinjau dari Aspek Ekonomi dan Aspek Fisik Kota

Berdasarkan hasil perhitungan pada sasaran sebelumnya, skor rata-rata penilaian kinerja dari responden akan ditempatkan pada diagram kartesius dengan sumbu mendatar (sumbu x), dan sumbu tegak (sumbu y) merupakan skor penilaian tingkat kepentingan dari responden. Sehingga menghasilkan diagram kartesius urutan variabel yang mempengaruhi peningkatan ketercapaian kota layak huni di Kota Bandar Lampung menurut tingkat persepsi dan preferensi masyarakat.

a. Hasil Diagram Kartesius

Pada diagram kartesius untuk aspek ekonomi, menunjukkan bahwa setiap kuadran menggambarkan posisi yang berbeda. Hasil kuadran I terdapat 1 (satu) indikator. Di kuadran II terdapat 3 (tiga) indikator, sedangkan pada kuadran III terdapat 4 (empat) indikator, dan 2 (dua) indikator yang berada di kuadran IV. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram kartesius dibawah ini:



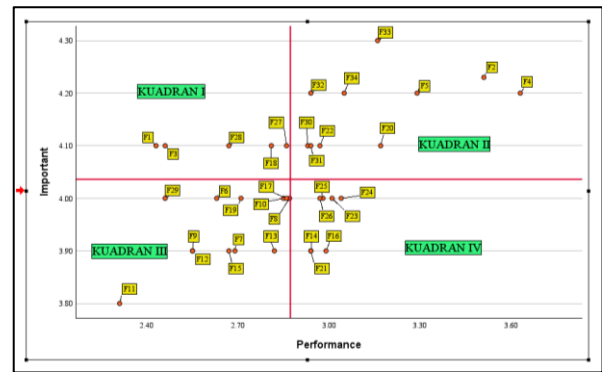
Gambar 5. Diagram Kartesius Aspek Ekonomi
Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan hasil analisis diagram kartesius diatas, banyak indikator aspek ekonomi yang terkumpul di kuadran II dan III, berikut merupakan penjabaran dari diagram kartesius diatas:

<p align="center"><u>Focus Effort & Concentrate Here</u></p> <p>a. Kemudahan berusaha</p>	<p align="center"><u>Keep Up The Good Work</u></p> <p>a. Kemudahan mendapat sembako b. Nutrisi makanan yang dikonsumsi warga c. Keterjangkauan PKL di perkotaan</p>
<p align="center"><u>Medium-Low Priority</u></p> <p>a. Kemudahan mendapatkan informasi kerja b. Kemudahan mendapatkan pekerjaan c. Keterjangkauan biaya hidup d. Penataan PKL di perkotaan</p>	<p align="center"><u>Reduce Emphasis</u></p> <p>a. Sektor informal dapat memberikan kontribusi terhadap ekonomi masyarakat b. Ketersediaan usaha informal</p>

Gambar 6. Matriks *Important Performance Analysis* (IPA) Aspek Ekonomi
Sumber: Hasil Analisis

Pada diagram kartesius untuk aspek fisik kota, menunjukkan bahwa setiap kuadran menggambarkan posisi yang berbeda. Hasil kuadran I terdapat 5 (lima) indikator. Di kuadran II terdapat 10 (sepuluh) indikator, sedangkan pada kuadran III terdapat 12 (dua belas) indikator, dan 7 (tujuh) indikator yang berada di kuadran IV. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram kartesius dibawah ini:



Gambar 7. Diagram Kartesius Aspek Fisik Kota
Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan hasil analisis diagram kartesius diatas, banyak indikator aspek fisik kota yang terkumpul di kuadran II dan III, berikut merupakan penjabaran dari diagram kartesius diatas:

<p align="center"><u>Focus Effort & Concentrate Here</u></p> <p>a. Kemudahan memiliki rumah b. Harga sewa dan harga jual rumah terjangkau c. Ketersediaan fasilitas umum di dalam kota d. Kepuasan terhadap kondisi jalur pejalan kaki/trottoir di lingkungan e. Tersedia fasilitas pendukung pejalan kaki</p>	<p align="center"><u>Keep Up The Good Work</u></p> <p>a. Kelayakan kondisi bangunan rumah yang ditinggali b. Merasa nyaman dan aman dengan kondisi perumahan c. Tersedia prasarana yang memadai d. Kemudahan menggunakan fasilitas olahraga e. Fasilitas olahraga yang tersedia ramah lingkungan dan berkelanjutan f. Kecukupan TPS di lingkungan g. Kepuasan terhadap pengangkutan sampah h. Ketersediaan tempat sampah umum di area publik i. Kemudahan mengakses tempat pemadatan sampah sementara komunal di lingkungan perumahan j. Terdapat petugas kebersihan</p>
<p align="center"><u>Medium-Low Priority</u></p> <p>a. Terdapat penyedia rumah bagi MHR b. Terdapat kebijakan atau program KOTAKU c. Keikutsertaan masyarakat dalam penataan kota d. Kemudahan memperoleh informasi pembangunan kota e. Frekuensi mengikuti musyawarah pembangunan f. Kepuasan dengan kualitas penataan kota secara keseluruhan g. Frekuensi aparat pemerintah melakukan sosialisasi tentang program pembangunan h. Kemudahan menemukan sanggar kesenian di lingkungan i. Frekuensi warga kota menikmati festival budaya j. Kepuasan terhadap kondisi dan kualitas taman kota k. Taman kota yang ada dapat digunakan oleh semua kalangan termasuk disabilitas l. Tersedia akses pejalan kaki yang ramah untuk penyandang disabilitas</p>	<p align="center"><u>Reduce Emphasis</u></p> <p>a. Kepuasan kondisi sanggar kesenian b. Kemudahan mengakses taman kota c. Terdapat berbagai macam fasilitas olahraga d. Kepuasan terhadap kondisi lapangan olahraga e. Kemudahan menjangkau fasilitas kelompok rentan f. Kepuasan terhadap pelayanan fasilitas kelompok rentan g. Kepuasan terhadap kondisi lingkungan fasilitas kelompok rentan</p>

Gambar 8. Matriks *Important Performance Analysis* (IPA) Aspek Fisik Kota
Sumber: Hasil Analisis

b. Variabel Prioritas Aspek Ekonomi dan Aspek Fisik Kota

Pada sasaran sebelumnya telah diketahui indikator yang memiliki kinerja baik atau buruk dan harapan yang tinggi dan juga sebaliknya. Tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi tersebut dalam perumusan arahan. Analisa deskriptif bertujuan memberikan suatu gambaran atas suatu kondisi dengan menggunakan teori atau kebijakan dan kondisi eksisting sebagai pembandingan dalam perumusan arahan dalam meningkatkan ketercapaian kota layak huni di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hal tersebut, peneliti hanya menggunakan hasil dari kuadran I dan kuadran III berdasarkan penilaian masyarakat dan pemetaan indikator kedua kuadran, karena kedua kuadran sama-sama memiliki kinerja yang rendah. Namun, akan lebih terfokus pada kuadran I dikarenakan variabel *focus effort & concentrate here* adalah hasil dari indikator yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi namun kinerjanya masih kurang sehingga merupakan prioritas yang butuh untuk ditingkatkan pada saat ini. Rekomendasi yang diberikan dalam setiap indikator menggunakan tiga sumber, yaitu kondisi eksisting terkait wilayah penelitian berdasarkan variabel, tinjauan kebijakan atau teori, serta dilengkapi dengan hasil wawancara kepada pihak pemerintah yang relevan dengan topik penelitian sehingga mendapatkan hasil rekomendasi sebagai berikut:

Aspek Ekonomi

Pada aspek ekonomi, indikator yang termasuk dalam kuadran I adalah kemudahan berusaha. Kuadran I merupakan kuadran dengan prioritas utama dimana responden merasakan indikator tersebut sangat penting atau mempunyai harapan yang tinggi, tetapi masyarakat belum merasakan kinerja yang maksimal atau tingkat kepuasan yang rendah, sehingga indikator yang berada dalam kuadran ini akan menjadi prioritas utama untuk dilakukannya perbaikan sebaik mungkin supaya tingkat kepuasan masyarakat dapat meningkat. Indikator yang masuk kedalam kuadran I memiliki nilai kepentingan tinggi diatas rata-rata sebesar 4,05, namun berdasarkan nilai persepsi tidak memuaskan dengan nilai berada dibawah rata-rata yaitu 2,99. Sehingga rekomendasi yang diberikan yaitu adanya kerjasama antara DPMPSTP dan UKM Kota Bandar Lampung sehingga dapat meningkatkan penyuluhan hukum kepada pelaku UMKM dalam melakukan pendaftaran izin berusaha, kemudian lebih mengencarkan sosialisasi kepada pelaku UMKM dan mengoptimalkan jaringan internet untuk mendukung akses terhadap OSS dan melakukan *update system* OSS secara berkala supaya sistem lebih stabil.

Sedangkan, untuk indikator pada aspek ekonomi yang berada di kuadran III yaitu kemudahan mendapatkan informasi kerja, kemudahan mendapatkan kerja, keterjangkauan biaya hidup, dan penataan PKL di perkotaan. Kuadran III merupakan kuadran yang didalamnya terdapat indikator dengan kepentingan yang rendah dan pada kenyataannya kinerja yang dirasakan oleh masyarakat pun pada kondisi eksistingnya dirasa kurang memuaskan. Namun, indikator-indikator yang berada di dalam kuadran III dapat menjadi perhatian yang lebih di masa yang akan datang dan perlu untuk mempertimbangkan indikator-indikator tersebut supaya kinerja yang dirasakan masyarakat dapat memuaskan. Namun, indikator dalam kuadran ini tidak terlalu menjadi prioritas seperti di kuadran I. Sehingga rekomendasi yang diberikan pada indikator kemudahan mendapatkan informasi kerja dan kemudahan mendapatkan pekerjaan yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin terkait penyelenggaraan *job fair* dan aplikasi SiGajah (sistem informasi ketenagakerjaan daerah Lampung), lalu memasang papan *billboard* terkait informasi seputar pekerjaan yang letaknya di pusat kota seperti bundaran gajah tugu adipura, serta adanya peningkatan koordinasi dengan berbagai macam perusahaan untuk menyediakan pelatihan yang lebih beragam bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. Untuk indikator keterjangkauan biaya hidup, rekomendasi yang diberikan yaitu diperlukannya penyesuaian Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK), adanya peningkatan dalam pemberdayaan ekonomi lokal khususnya UMKM, serta peningkatan akses dan kualitas layanan dasar seperti air bersih, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Indikator terakhir dalam kuadran III pada aspek ekonomi adalah penataan PKL di perkotaan, terdapat beberapa langkah penataan PKL di perkotaan yang dapat dilakukan supaya masyarakat merasa puas yaitu PKL yang ada di Kota Bandar Lampung, perlu diarahkan ke lokasi atau tempat usaha yang sesuai dengan peraturan pemerintah serta diberlakukannya waktu berdagang bagi PKL, kemudian PKL harus lebih memperhatikan kebersihan lingkungan dan menaati peraturan yang ada di Kota Bandar Lampung.

Aspek Fisik Kota

Pada aspek fisik kota, indikator yang termasuk dalam kuadran I sebanyak 5 indikator. Kuadran I merupakan kuadran dengan prioritas utama dimana responden merasakan indikator tersebut sangat penting atau mempunyai harapan yang tinggi, tetapi masyarakat belum merasakan kinerja yang maksimal atau tingkat kepuasan yang rendah, sehingga indikator yang berada dalam kuadran ini akan menjadi prioritas utama untuk dilakukannya perbaikan sebaik mungkin supaya tingkat kepuasan masyarakat dapat meningkat. Indikator yang masuk kedalam kuadran I yaitu kemudahan memiliki rumah, harga sewa dan harga jual rumah terjangkau, ketersediaan fasilitas umum di taman kota, kepuasan terhadap kondisi jalur pejalan kaki/trotoar di lingkungan, dan tersedia fasilitas pendukung pejalan kaki. dengan nilai kepentingan tinggi diatas rata-rata sebesar 4,00, namun berdasarkan nilai persepsi tidak memuaskan dengan nilai berada dibawah rata-rata yaitu 2,87. Sehingga rekomendasi yang dapat diberikan yaitu untuk indikator kemudahan memiliki rumah, harga sewa dan harga jual lahan rumah terjangkau, diperlukan pengembangan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) supaya program yang ada dapat berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran, lalu pembangunan rusunawa di Kecamatan yang memang banyak permukiman kumuh didalamnya seperti Kecamatan Teluk Betung dan Kecamatan Panjang, serta mengadakan skema kredit perumahan dan adanya kolaborasi antara pemerintah dengan stakeholder. Sedangkan, untuk ketersediaan fasilitas umum di taman kota, kepuasan terhadap jalur pejalan kaki atau trotoar, serta tersedia fasilitas pendukung pejalan kaki. Diperlukan peningkatan pelayanan fasilitas yang memadai dengan melakukan revitalisasi taman kota dan juga jalur pejalan kaki bagi masyarakat sesuai dengan fungsinya dan standar yang memang sudah ditetapkan. Hal tersebut juga didukung dengan adanya kolaborasi antar pemerintah kota, swasta, dan masyarakat Kota Bandar Lampung.

Sedangkan, untuk indikator pada aspek fisik kota yang berada di kuadran III yaitu sebanyak 12 indikator dengan rekomendasi yang diberikan berbeda-beda dan sudah disesuaikan dengan kondisi eksisting dan kebijakan atau teori serta hasil wawancara sama seperti indikator-indikator lainnya. Untuk indikator penyediaan rumah bagi MBR, kebijakan program KOTAKU. Sebagai upaya pengendalian penyediaan perumahan bagi MBR, Pemerintah harus lebih selektif dalam memberikan subsidi perumahan pada masyarakat dengan melakukan pendataan, supaya bantuan atau program yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran, selain itu dilakukannya pengembangan perumahan vertikal dengan konsep desain arsitektur modular yaitu solusi konsep desain inovatif dan efisien, konsep desain ini menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh kawasan industri yang padat dan keterbatasan lahan, serta menawarkan solusi yang layak dalam bentuk hunian vertikal bertingkat menengah dengan maksimal enam lantai khususnya di Kecamatan Panjang, Bumiwaras dan Sukabumi dan adanya peningkatan peran dan kesadaran masyarakat dalam proses pemeliharaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman melalui program pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan rutin bersih-bersih lingkungan. Sedangkan, untuk indikator keikutsertaan masyarakat dalam penataan kota, kemudahan memperoleh informasi pembangunan perkotaan, frekuensi mengikuti musyawarah pembangunan, dan frekuensi aparat pemerintah dalam melakukan sosialisasi tentang program pembangunan, rekomendasi yang dapat

dilakukan untuk peningkatan indikator tersebut adalah menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat khususnya dalam setiap pembangunan yang ada di Kota Bandar Lampung melalui Focus Group Discussion dan pembentukan forum kota seperti rencana pengembangan aglomerasi perkotaan atau metropolitan Bandar Lampung Raya, yang melibatkan asosiasi profesi, media massa, LSM, lembaga kemasyarakatan formal hingga lembaga tingkat perwakilan rakyat serta peningkatan informasi publik melalui berbagai media (cetak, elektronik, internet, dan lainnya, sehingga mudah dilihat dan diakses oleh masyarakat). Untuk indikator kepuasan dengan kualitas penataan secara keseluruhan, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan indikator tersebut dengan pengembangan pusat kegiatan pelayanan perkotaan dengan memastikan keberlanjutan penggunaan lahan yaitu membatasi pembangunan liar dan pemerintah kota dapat menempatkan PKL dan parkir di tempat-tempat yang lahannya milik pemerintah dan dibuatkan bangunan semi permanen yang pembangunannya melibatkan para pedagang PKL sehingga nantinya PKL dikenakan sewa atau retribusi. Selanjutnya indikator kemudahan menemukan sanggar kesenian di lingkungan, frekuensi warga kota menikmati festival budaya dapat dilakukan peningkatan dengan adanya kolaborasi bersama Dinas Kesenian dan Budaya, sekolah formal serta masyarakat lokal dengan menyediakan berbagai macam fasilitas sanggar dan mengadakan workshop pelatihan secara rutin, menggelar pentas seni di tempat-tempat yang ramai dikunjungi seperti lapangan PKOR supaya dapat terus meningkatkan minat masyarakat dan berinovasi dalam melestarikan kesenian budaya daerah, hal tersebut juga didukung dengan promosi dan pemasaran yang efektif. Untuk indikator kepuasan terhadap kondisi dan kualitas taman kota dan indikator akses pejalan kaki yang ramah untuk penyandang disabilitas dapat ditingkatkan dengan adanya komitmen dari pemerintah untuk dapat mengarahkan perencanaan dan penerapan taman kota yang memperhatikan kebutuhan masyarakat oleh semua kalangan masyarakat supaya setiap kalangan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati fasilitas sarana prasarana yang ada di kota khususnya taman kota, dengan memasang rampa untuk kursi roda, menyediakan toilet umum yang ramah disabilitas, serta memastikan bahwa area rekreasi yang ada aman untuk digunakan, selain itu adanya penambahan jumlah vegetasi atau optimalisasi pemeliharaan taman seperti di taman dipangga sehingga perlu adanya renovasi oleh pihak pengelola taman kota karena kondisi dan kualitas taman kota tersebut sangat tidak memadai. Sedangkan, untuk akses pejalan kaki yaitu perbaikan jalur pedestrian dengan memastikan bahwa pedestrian memiliki trotoar yang datar, lebar, dan bebas dari hambatan seperti tiang lampu atau pohon dengan dilengkapi dengan rampa untuk kursi roda disetiap jalan yang menanjak atau turun, lalu pemasangan tanda dan marka jalan yang jelas dan kontras, serta dipasangnya fasilitas penyebrangan seperti lampu penerangan, karena banyak sekali pedestrian di Kota Bandar Lampung yang minim pencahayaan, dan yang terakhir adalah adanya perawatan dan pemeliharaan serta meningkat kesadaran masyarakat supaya tidak menyalahgunakan fungsi jalur pejalan kaki, sehingga jalur penyandang disabilitas yang memang sudah ada dapat dipelihara dengan baik dan tidak terganggu oleh aktivitas lain.

Temuan dan Kesimpulan

1. Temuan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut ini merupakan beberapa temuan-temuan studi yang didapatkan untuk memberikan jawaban terhadap sasaran dari hasil penelitian:

- Dari hasil penelitian dapat dilihat tingkat kelayakan antara persepsi dan preferensi masyarakat pada aspek ekonomi dan aspek fisik kota secara keseluruhan. Untuk aspek ekonomi memiliki nilai rata-rata kelayakhunian kota sebesar 74.026% dan nilai rata-rata kelayakhunian kota pada aspek fisik sebesar 71.118%. Kemudian untuk perhitungan nilai *mean* (rata-rata) pada aspek ekonomi dan aspek fisik kota dapat dilihat bahwa terdapat sebanyak 44 indikator, memiliki nilai preferensi masyarakat jauh lebih besar dari nilai persepsi masyarakat. Selain itu, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan dari hasil survei atau penilaian yang dilakukan oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) pada tahun 2022 hingga tahun 2024 pada kedua aspek yang diteliti.
- Penelitian ini menganalisis gap atau kesenjangan terkait variabel-variabel kota layak huni pada aspek ekonomi dan aspek fisik kota. Sehingga dapat dilihat bahwa dari seluruh 44 indikator berdasarkan persepsi dan preferensi masyarakat terdapat *gap* atau kesenjangan, ditunjukkannya dengan nilai negatif dan tidak ada yang bernilai positif satupun.
- Didapatkan indikator yang dianggap masyarakat memiliki kinerja paling rendah, untuk aspek ekonomi hanya 1 indikator yaitu kemudahan berusaha dan untuk aspek fisik kota sebanyak 5 indikator yaitu kemudahan memiliki rumah, harga sewa dan harga jual rumah terjangkau, ketersediaan fasilitas umum di taman kota, kepuasan terhadap kondisi jalur pejalan kaki serta tersedia fasilitas pendukung pejalan kaki. Sedangkan indikator yang dianggap masyarakat memiliki tingkat kepentingan yang tinggi, untuk aspek ekonomi terdapat 3 indikator yaitu kemudahan mendapatkan sembako, nutrisi makanan yang dikonsumsi warga dan keterjangkauan PKL di perkotaan dan untuk aspek fisik kota sebanyak 10 indikator yaitu kelayakan kondisi bangunan rumah yang ditinggali, merasa nyaman dan aman dengan kondisi perumahan, tersedia prasarana yang memadai, kemudahan menggunakan fasilitas olahraga, fasilitas olahraga yang tersedia ramah lingkungan dan berkelanjutan, Ketercukupan TPS di lingkungan, kepuasan terhadap pengangkutan sampah, ketersediaan tempat sampah umum di area publik, kemudahan mengakses tempat pewadahan sampah sementara komunal di lingkungan perumahan dan terdapat petugas kebersihan.

2. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk menentukan variabel prioritas dalam peningkatan ketercapaian kota layak huni di Kota Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama terkait bagaimana penilaian kota layak huni di Kota Bandar Lampung ditinjau dari aspek ekonomi dan aspek fisik kota berdasarkan persepsi dan preferensi masyarakat sebagai berikut:
 - Pada saat ini, berdasarkan persepsi dan preferensi masyarakat terkait penilaian kota layak huni di Kota Bandar Lampung secara keseluruhan memiliki tingkat kelayakhunian kota dengan kategori cukup layak huni atau cukup baik, karena berada pada range presentase tingkat kelayakan di angka 61% -

75%. Namun, masih terdapat beberapa indikator baik aspek ekonomi maupun aspek fisik yang memiliki tingkat kelayakhunian kota, kurang layak huni atau kurang baik ditandai dengan nilai yang berada pada range 46%-60%. Dari seluruh indikator sebanyak 44, tidak ada yang memiliki tingkat kelayakhunian kota yaitu sangat layak huni atau sangat baik karena untuk bisa mencapai kategori tersebut harus berada pada range angka 86-100%. Sedangkan tingkat kelayakan tertinggi pada penelitian ini hanya sebesar 81.517% yaitu pada variabel ketahanan pangan, tepatnya pada indikator kemudahan mendapatkan sembako. Kemudian untuk aspek ekonomi, nilai rata-rata pada jumlah nilai masing-masing variabel dari tingkat persepsi masyarakat sebesar 2,99 dan rata-rata dari tingkat preferensi masyarakat sebesar 4,05. Sedangkan untuk aspek fisik kota yaitu nilai rata-rata pada jumlah nilai masing-masing variabel dari tingkat persepsi masyarakat sebesar 2,87 dan rata-rata dari tingkat preferensi masyarakat sebesar 4,00. Maka dari kedua nilai *mean* (rata-rata) tersebut akan menentukan letak-letak setiap variabel dalam diagram kartesius apakah dikuadran I, II, III atau IV dan dapat dilihat tingkat kinerja paling rendah dan tingkat kepentingan paling tinggi. Dari hasil penilaian kota layak huni pada aspek ekonomi dan aspek fisik kota, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan walaupun tidak signifikan karena hanya selisih 1 tahun saja, sebanyak 2,4% dari hasil survei atau penilaian yang dilakukan oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) pada tahun 2022 menjadi 60%, yang sebelumnya hanya 57,60% saja, dan dari 44 indikator yang diteliti terdapat peningkatan dan penurunan nilai indeks.

- b. Untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua terkait apakah terdapat *gap* atau kesenjangan terkait variabel kota layak huni berdasarkan persepsi dan preferensi masyarakat sebagai berikut:
- Pada aspek ekonomi, *gap* tertinggi pada indikator penataan PKL di perkotaan, sedangkan *gap* terendah berada pada indikator keterjangkauan PKL di perkotaan. Untuk aspek fisik kota *gap* tertinggi pada indikator kemudahan memiliki rumah, sedangkan *gap* terendah berada pada indikator merasa nyaman dan aman dengan kondisi perumahan yang saat ini ditinggali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 44 indikator aspek ekonomi dan aspek fisik kota, pada saat ini kinerjanya tidak ada atau belum memenuhi harapan masyarakat.
- c. Untuk menjawab pertanyaan penelitian ketiga terkait apa saja variabel yang perlu ditangani secara prioritas pada aspek ekonomi dan aspek fisik kota berdasarkan persepsi dan preferensi masyarakat sebagai berikut:
- Untuk meningkatkan ketercapaian kota layak huni di Kota Bandar Lampung lebih difokuskan pada indikator yang berada pada kuadran I dan III, karena kedua kuadran tersebut sama-sama memiliki kinerja yang rendah, tetapi kuadran I lebih di prioritaskan karena memiliki kepentingan yang lebih tinggi dari kuadran III. Pada aspek ekonomi yang berada pada kuadran I adalah indikator yang memiliki nilai kepentingan tinggi diatas 4,05 serta memiliki nilai kinerja di bawah 2,99 dan untuk indikator yang berada pada kuadran III adalah indikator yang memiliki nilai kepentingan rendah dan nilai kinerja yang juga rendah di bawah rata-rata. Sedangkan pada aspek fisik kota yang berada pada kuadran I adalah indikator yang memiliki nilai kepentingan tinggi diatas 4,00 serta memiliki nilai

kinerja di bawah 2,87 dan untuk kuadran III sama seperti aspek ekonomi yaitu indikator yang memiliki nilai kepentingan rendah dan nilai kinerja yang juga rendah di bawah rata-rata.

Daftar Pustaka

- Annisa, P. S., & Hizbaron, D. R. (2016). Kajian kondisi layak huni kota Balikpapan berdasarkan persepsi masyarakat. *Jurnal Bumi Indonesia*, 5(1).
- Choirunnisa, B. (2016). Tingkat kenyamanan di berbagai taman kota di Bandar Lampung.
- Darise, D. I. (2015). Kajian Kota Manado sebagai Kota Layak Huni Berdasarkan Kriteria (IAP) Ikatan Ahli Perencanaan. *SPASIAL*, 1(1), 131-140.
- Ervianto, W. I., & Felasari, S. (2019). Pengelolaan permukiman kumuh berkelanjutan di perkotaan. *Jurnal Spektran*, 7(2), 178-186.
- Fanggidae, L. W. (2023). MENENTUKAN TINGKAT LAYAK HUNI KOTA KUPANG (SUATU PENDEKATAN). *VISTA*, 1(1), 21-28.
- Giovani, F. (2021). Kajian arahan pengembangan bagi tercapainya kota layak huni ditinjau dari aspek fisik di Kota Tangerang Selatan. *SKRIPSI-2021*.
- HASIBUAN, L. H. (2021). *EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 SKRIPSI* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Hisyam, M. I. (2021). *Kajian Kota Pekanbaru Menuju Kota Layak Huni* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Irvhan Bp, A. T. P. (2023). *PENERAPAN KONSEP KOTA LAYAK HUNI DI KELURAHAN TALLO BERDASARKAN PERSEPSI MASYARAKAT= Application of the Livable City Concept in Tallo Village Based on Community Perceptions* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Iswara, R., Astuti, W., & Putri, R. A. (2017). Kesesuaian Fungsi Taman Kota Dalam Mendukung Konsep Kota Layak Huni Di Surakarta. *Arsitektura*, 15(1), 115-123
- Lestari, F. (2020). Identifikasi Fasilitas Pejalan Kaki Di Kota Bandar Lampung. *Journal of Infrastructural in Civil Engineering*, 1(01), 27-32.
- Makalalag, A., Gosal, P. H., & Hanny, P. (2019). Kajian kota kotamobagu menuju kota layak huni (livable city). *Spasial*, 6(2), 199-210.
- Noegroho, N. (2010). Penataan Perumahan Kumuh di Perkotaan Berbasis Kawasan. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 1(2), 1033-1040.
- Nugroho, F. I., Setyono, D. A., & Kurniawan, E. B. (2022). Identifikasi Kriteria Layak Huni Permukiman Di Kota Malang. *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, 14(1), 1-8.
- Patrisia, N. E. (2017). Penataan perumahan kumuh kota berbasis kawasan. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 4(2).
- Rahadian, A. H. (2016, February). Strategi pembangunan berkelanjutan. In *Prosiding Seminar STIAM I* (Vol. 3, No. 1, pp. 46-56).
- Rizal, R. N., & Prasetya, D. B. (2020). Kesesuaian Taman Kota Sebagai Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Di Kota Bandar Lampung 2020. *Bandar Lampung*.
- Saraswati, Z. F. (2020). Konsep Penataan Jalur Pejalan Kaki di Kawasan Taman Gajah, Kota Bandar Lampung. *Jurnal Arsitektur*, 10(2), 63-68.